

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, C. *Badan Hukum*. Bandung: PT Alumni, 2015.
- Christiawan, Rio. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok: Rajawali Persada, 2021.
- Effendi, Muh. Arief. *The Power of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Fuady, Munir. *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, t.t.
- Harris, Freddy, dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Cetakan kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Edisi 1, Cetakan 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Huizink, J. B. *Insolventie*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, t.t.
- Ilyas, Wirawan B., dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, 1961.
- Malian, Sobirin. *Pengantar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

- McCarty, F. William MC., dan John W. Bagby. *The Legal Environment of Business*. Boston: Irwin, 1990.
- Muljadi, Kartini. *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*. Bandung: Alumni, t.t.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ramlan, S. H., Rizka Syafriana, dan Dewi Kartika. *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia*. Cetakan pertama. Medan: UMSU Press, 2024.
- Ramlan. *Hukum Perusahaan: Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia*. Medan: CV Pustaka Prima, 2019.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi ke-10. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktik di Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Suekapto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Situmorang, Manahan MP. *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan*. Malang: Setara Press, 2017.

- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1957.
- Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Widjaja, I. G. Rai. *Hukum Perusahaan: Khusus Pemahaman atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas berlaku (efektif) sejak 7 Maret 1996*. Edisi revisi. Jakarta: Kesaint Blanc, 2006.
- Widjaja, I. G. Rai. *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018.
- Yuwono, Verina, dan Setianto. *Pertanggungjawaban Pribadi Direksi pada Perseroan Terbatas yang Pailit*. t.t.: t.p., 2017.

Jurnal

- Adiningsih, Ni Komang Nea, dan M. Wartanto. “Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham.” *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 4 (2019): 831.
- Diarsa, Ketut Octania Fineta, Etik Yuniati, Surahmat Syam, dan Tofani Yurisar Akbar. “Perlindungan Hukum bagi Direksi atas Tagihan Pajak yang Masih Terutang Pasca Pembersihan Harta Pailit.” *Notaire* 6, no. 2 (Juni 2023): 243–253.
- McMillan, Lori. “The Business Judgment Rule as an Immunity Doctrine.” *William and Mary Business Law Review* 4 (2013): 521.
- Muryanto, Y. T. “Menakar Penerapan Business Judgment Rule dalam Kasus Jiwasraya.” *RechtsVinding* (2020): 1–3.
- Nugroho, Adrianto Dwi. “Sistem Self Assessment dalam Pembayaran Pajak Penghasilan.” *Jurnal Penelitian Terapan dan Akuntansi Manajemen* 2, no. 2 (2024): 770.

- Prasetya, M. Syarif. “Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam Perspektif Piercing the Corporate Veil.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 325–342.
- Sarsht, S. “The Business Judgment Rule Revisited.” *Hofstra Law Review* 8 (1979): 97–99.
- Sitompul, Manahan MP. “Konstitusionalitas Pelunasan Utang Pajak Perusahaan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (Desember 2021): 732–739.
- Situmorang, Rightmen M. S. “Doktrin Piercing the Corporate Veil di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2021): 534–552.
- Syarief, Elza, dan Attika Balqist. “Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris.” *Journal of Law and Policy Transformation* 2, no. 2 (Desember 2017): 87.
- Taqiya, Zidna, Nyulistiowati Suryanti, dan Aam Suryamah. “Penagihan Utang Pajak terhadap Direksi Perseroan yang Dinyatakan Pailit dalam Putusan MK No. 41/PUU-XVIII/2020.” *INNOVATIVE Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4907–4916.
- Bainbridge, Stephen. “The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine.” *Vanderbilt Law Review* 57 (2004): 88.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar*.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terhadap UUD 1945.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).*

Lembaga / Laporan Resmi

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. *Data Statistik Perkara Kepailitan dan PKPU Tahun 2021–2023.* Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023.

Sumber Internet

Direktorat Jenderal Pajak. “Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem Self Assessment dalam Perpajakan.” 2024. Diakses 9 Januari 2026. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengupas-latar-belakang-penerapan-sistem-self-assessment-dalam-perpajakan>.